

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan pada tingkat nasional maupun tingkat daerah saat ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “untuk memajukan kesejahteraan umum” , sehingga pembangunan yang ada di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Sedangkan pembangunan daerah sendiri diupayakan agar daerah tersebut dapat mengelola potensi daerahnya bersama masyarakat serta meningkatkan perkembangan pada bidang ekonomi dan menciptakan suatu lapangan kerja baru bagi masyarakatnya.

Dalam menunjang keberhasilan pembangunan diperlukan penerimaan atau pemasukan negara yang kuat, dimana sumber pembiayaan diusahakan tetap berasal dari penerimaan dalam negeri dan penerimaan dari sumber-sumber luar negeri hanya sebagai pelengkap. Kemandirian pembangunan diperlukan baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah, hal ini tidak terlepas dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat dengan kebijaksanaannya. Kebijakan tentang keuangan daerah ditempuh oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah mempunyai kemampuan membiayai pembangunan daerahnya sesuai dengan prinsip daerah otonomi yang nyata.

Otonomi Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Kemudian didukung dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

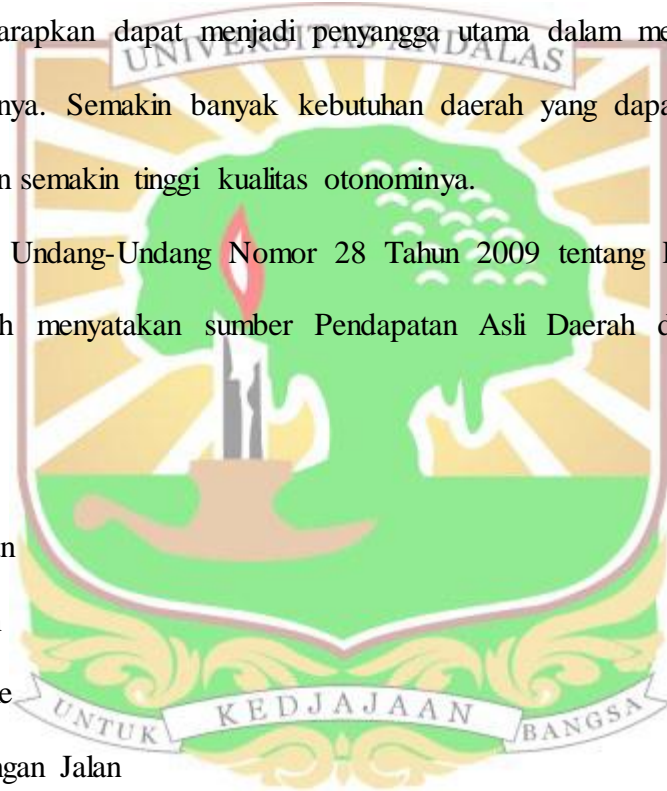
Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang dimaksud dengan otonomi daerah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan otonomi daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggara pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelayanan pembangunan.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah diantaranya dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, khususnya Pajak Daerah.

Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah karena merupakan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah, dimana proporsi PAD terhadap total penerimaan merupakan indikasi kemampuan kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah. Sumber-sumber PAD sebenarnya sangatlah diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi pendanaan daerah dan diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan-kegiatan daerahnya. Semakin banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai dengan PAD, maka akan semakin tinggi kualitas otonominya.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan sumber Pendapatan Asli Daerah dari pajak daerah meliputi :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.



Pada penelitian ini penulis tertarik meneliti pajak hotel dan restoran yang ada di Kota Padang dan Bukittinggi. Karena Kota Padang dan Kota Bukittinggi sama-sama memiliki objek wisata yang sering dikunjungi oleh wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor penerimaan terbesar dalam peningkatan perekonomian daerah. Dengan banyaknya wisatawan yang datang ke Kota Padang dan Kota Bukittinggi tersebut, maka dibutuhkan dana yang sangat besar untuk menyelenggarakan pembangunan daerah Kota Padang dan Kota Bukittinggi maupun infrastruktur yang menunjang penyelenggaraan pembangunan daerah tersebut. Untuk menyelenggarakan pembangunan daerah, pemerintah kota harus mengusahakan sendiri mendapatkan dana tersebut yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

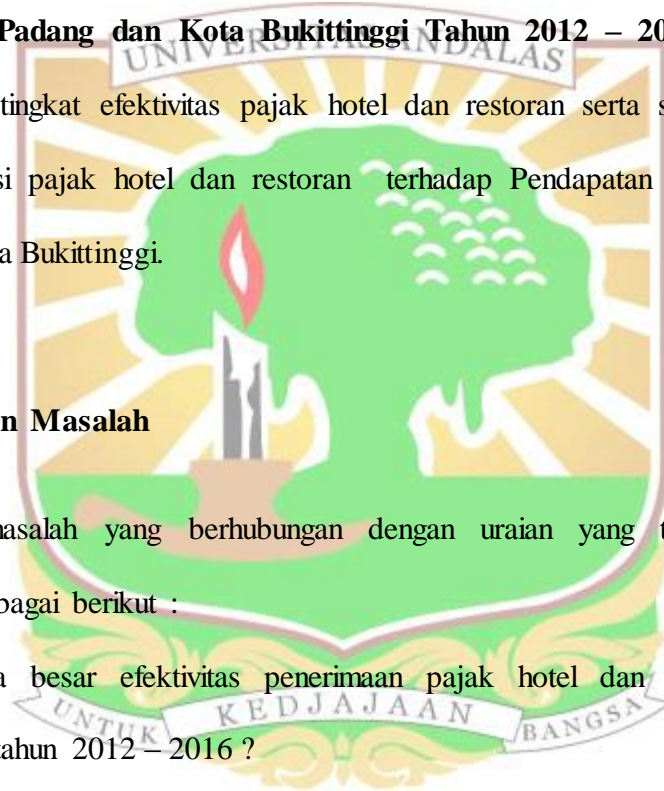
Seiring besarnya potensi penerimaan pendapatan daerah dari sektor pariwisata, didukung dengan banyaknya jumlah wisatawan yang datang dan selalu mengalami peningkatan jumlah wisatawan setiap tahunnya. Pemerintah kota Padang dan Kota Bukittinggi dapat meningkatkan efektivitas serta kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran yang merupakan bagian dari Pajak Asli Daerah. Mengoptimalkan potensi dari sektor pariwisata, salah satunya dengan meningkatkan pelayanan fasilitas wisatawan di bidang penginapan dan restoran. Kota Padang dan Kota Bukittinggi memiliki keunggulan masing-masing dalam mengembangkan sektor pariwisata. Dengan demikian, dibutuhkan perhatian yang lebih besar dari pemerintah untuk menggali potensi pajak hotel dan restoran dalam mendongkrak penerimaan PAD.

Melihat pentingnya penerimaan Pajak hotel dan restoran di Kota Padang dan Kota Bukittinggi sebagai salah satu komponen penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan dengan didukung oleh latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menulis dalam skripsi tentang **“Analisis Perbandingan Efektivitas serta Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran pada Pendapatan Asli Daerah Kota Padang dan Kota Bukittinggi Tahun 2012 – 2016”**. Penelitian ini berfokus pada tingkat efektivitas pajak hotel dan restoran serta seberapa besarkah tingkat kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang dan Kota Bukittinggi.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang berhubungan dengan uraian yang telah diungkapkan diatas adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Padang tahun 2012 – 2016 ?
2. Seberapa besar efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Bukittinggi tahun 2012 – 2016 ?
3. Seberapa besar kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kota Padang tahun 2012 – 2016 ?
4. Seberapa besar kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kota Bukittinggi tahun 2012 – 2016 ?



5. Bagaimana perbandingan efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran serta kontribusi terhadap PAD Kota Padang dan Kota Bukittinggi tahun 2012-2016 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut tujuan penelitian yang berhubungan dengan uraian yang telah diungkapkan diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Padang tahun 2012 – 2016.
2. Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Bukittinggi tahun 2012 - 2016.
3. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap PAD kota Padang tahun 2012 - 2016.
4. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kota Bukittinggi tahun 2012 - 2016.
5. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran serta kontribusi terhadap PAD Kota Padang dan Kota Bukittinggi tahun 2012-2016.

1.4 Manfaat penelitian

1. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman bagi pemerintah daerah Kota Padang dan Kota Bukittinggi untuk menetapkan kebijakan pengelolaan

pendapatan daerah dan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan keuangan daerah. Sehingga pencapaian penerimaan PAD terus meningkat dan mencapai target.

2. Bagi penulis

Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat mengetahui secara lebih jelas praktek yang ada dilapangan dan dapat membandingkan teori yang telah diperoleh dimasa perkuliahan dengan praktek yang sebenarnya yang terjadi di lapangan sehingga ilmu yang diperoleh cakupannya lebih luas dan dapat dipraktikkan langsung.

3. Bagi pembaca

Dengan membaca skripsi berdasarkan penelitian ini, pembaca diharapkan dapat menambah wawasan tentang apa yang telah mereka baca dan dapat dijadikan pedoman apabila penelitian ini digunakan untuk selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam penulisan suatu penelitian. Pada penelitian ini sistematika penulisan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

Bab Satu adalah bab pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penelitian. Bab Dua menjelaskan landasan teori, dimana bab ini berisikan tentang landasan teori yang mendukung dalam analisis perumusan masalah. Kemudian terdapat review terdahulu yang metode dan teknik pengumpulan data menjadi acuan dalam penelitian ini dan juga terdapat kerangka pemikiran penelitian yang akan diteliti. Pada bab Tiga akan dijelaskan tentang desain penelitian, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan.

Sedangkan bab Empat memperlihatkan metode analisis data yang dilakukan selama penelitian serta hasil dan pembahasannya. Selanjutnya bab Lima berisi kesimpulan dan hasil analisa data serta saran yang dianggap perlu untuk pemerintah daerah dalam pengelolaan pendapatan asli daerah agar terjadi peningkatan setiap tahunnya.

